

SKRIPSI
PENGGUNAAN BASIS AKRUAL DALAM LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN WATAMPONE

MUHAMMAD CHAIKAL

10573 03981 12



PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2018

SKRIPSI
PENGGUNAAN BASIS AKRUAL DALAM LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN WATAMPONE

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD CHAIKAL

10573 03981 12

Kepada

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR

2018



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penggunaan Basis Akrual Dalam Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Muhammad Chaikal

Nim : 105730 43981 12

Program Studi : Akuntansi

Jenjang Studi : Strata Satu (S-1)

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah di periksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada tanggal 12 Februari 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 12 Februari 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA
NBM: 497 794



Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si
NBM:1263422

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi




Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak. CA
NBM: 1073428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama Muhammad Chaikal dengan No. Stambuk 105730 3981 12 telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 17 Tahun 1439 H/2018 M dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari senin, 12 Februari 2018. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

26 Jumadil Awal 1439 H

Makassar,

12 Februari 2018 M

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E.,M.M.
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, S.E.,M.M.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, M.M.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 - a. Dr. Hj. Ruliaty, M.M
 - b. Faidhul Adziem, S.E.,M.Si
 - c. Agusdiwana Suarni, S.E.,M.ACC
 - d. Hj. Naidah, S.E.,M.Si

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kesehatan dan melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “*Penerapan Basis Akrual Dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bone*” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah di rencanakan, salawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, selaku utusan Allah SAW di muka bumi yang menjunjung para ummat islam menuju kejalan yang benar dan menghindarkan diri dari jalan yang sesat.

Penulis telah berusaha menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh penulis, penulis menyadari bahwa keterbaasan serta kelemahan senantiasa ada dalam diri penulis. Oleh karena itu, tanggapan, kritikan dan saan akan di terima dengan terbuka.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong SE MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., Msi., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA selaku Pembimbing 1 dan Ibu Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan tenaga kerja dan pikirannya untuk mengarahkan dan memberikan dukungan kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini.
5. Teman – teman Ak10.12 sahabat seperjuangan yang tidak sempat saya sebutkan semua namanya, dan Aldi Rinaldi yang selalu membantu serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam pembuatan tugas akhir.
6. Terima kasih juga untuk kedua orang tuaku yang menjadi tujuan hidupku dalam menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Terima kasih pula kepada keluarga dan kerabat yang memberikan dukungan selama menyelesaikan studi saya, kepada semuanya terima kasih banyak.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada Almamater Universitas Muhammadiyah Makassar, semoga dengan kehadiran skripsi akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Akuntansi, Amin Yarabbal Alamin...

Makassar, 20 Juli 2017

penulis

ABSTRAK

**Muhammad Chaikal : “Penerapan Basis Akruwal Dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bone”
Dibimbing oleh Mahmud Nuhung dan Sitti Zulaeha**

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, maka tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan yang terdiri dari Neraca, laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan basis akrual dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif dan lebih baik bagi para pemangku kepentingan baik para pengguna laporan keuangan dibandingkan dengan basis kas dan basis kas menuju akrual yang selama ini dianut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Bone pada tahun 2015 telah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal. Laporan keuangan BPKAD Kab. Bone terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan arus kas, laporan oprasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Faktor yang mendukung dalam laporan keuangan seperti sumber daya manusia masih menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan BPKAD Kabupaten Bone berbasis akrual yang menyebabkan laporan keuangan pada tahun anggaran 2015 mengalami keterlambatan.

Kata kunci : Akruwal, laporan keuangan, Akuntansi

MOTTO DAN PESEMBAHAN

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa berusaha”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebaikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya.. (Q.S. Al-Baqarah 286)”

“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah.”

Kupersembahkan karya sederhana ini buat kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Andi Arifuddin dan Ibunda Andi Sahari Bulan, serta Saudaraku tercinta yang senantiasa menyayangiku, berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah SWT dan selalu memberikan yang terbaik serta selalu mengharapkan kesuksesan. Doa, Pengorbanan, Nasehat, serta Kasih Sayang, yang tulus menunjang kesuksesan penulis dalam menggapai cita-cita.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Penulian	4
D. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Tinjauan Teori.....	6
1. Pengertian Akuntansi.....	6
2. Basis Akuntansi.....	7
3. Basis Akuntansi Yang Digunakan Pemerintah.....	8
4. Tujuan dan Manfaat Penerapan Basis AkruaI	11
5. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Basis AkruaI	13
6. Tantangan Dalam Penerapan Basis AkruaI	15
7. Strategi Penerapan Basis AkruaI	16
B. Penelitian Terdahulu	19
C. Kerangka Pikir.....	21

D. Hipotesis.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
A. Waktu dan Penelitian.....	23
B. Metode dan Pengumpulan Data.....	23
C. Jenis dan Sumber Data	23
D. Teknik Analisis Data	24
E. Definisi Operasional.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	27
A. Gambaran Umum Kabupaten Bone.....	27
B. Visi, Misi, dan Tujuan BPKAD Bone	28
C. Struktur Organisasi	28
D. Tugas dan Fungsi.....	30
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Hasil Penelitian.....	32
B. Pembahasan	34
1. Makna Basis AkruaI Pemerintah Kabupaten Bone: Kompleksitas Laporan Keuangan	34
2. Analisis Kendala Dalam Implementasi Basis AkruaI Pada Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Bone	37
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	42

LAMPIRAN –LAMPIRAN	43
--------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir	22
Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bone	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Akuntansi Sektor publik yang semakin pesat, hal ini disebabkan karena adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Dalam salah satu penjelasan di Undang-undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa SAP ditetapkan dalam suatu peraturan pemerintah yang saat ini diatur dengan PP No. 71 Tahun 2010.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 Ayat (1) tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan penggunaan basis akrual dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja untuk dilaksanakan selambat-lambatnya Dalam 5 (lima) tahun. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual

menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket Undang-Undang Keuangan Negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja. Dalam membiayai kegiatan dan pelaksanaan tugasnya, Dinas pendapatan daerah Kabupaten Bone memperoleh alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh karena itu, pemerintah kab. Bone wajib menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pengelolaan anggaran daerah yang diperolehnya. Dinas pendapatan daerah kab. Bone wajib menyusun laporan keuangan yang berlandaskan pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan menjadi dasar diberikannya opini atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone.

Hingga terbit Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengganti PP No. 24 Tahun 2005. Pada PP No. 71 Tahun 2010 batas waktu penerapan sistem akuntansi akrual secara penuh (*full accrual*) diundur sampai dengan tahun 2014. SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komitmen dari organisasi/instansi dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan organisasi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya BPKD (Badan Pemeriksa Keuangan Daerah) penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Kota Bone harus melakukan berbagai persiapan, seperti penyusunan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual, pelatihan sumber daya manusia, dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang penerapan basis akrual. Persiapan tersebut dilakukan pemerintah Kab. Bone agar siap dan dapat mengatasi berbagai kendala dalam penerapan basis akrual. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penggunaan Basis Akrual Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone”

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan penerapan akuntansi akrual pada BPKAD di Kabupaten Bone?
2. Bagaimanakah kendala penerapan sistem akrual pada laporan keuangan BPKAD Kabupaten Bone?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hendaknya terlebih dahulu ditetapkan tujuan yang akan di capai dengan jelas. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Untuk memahami penggunaan penerapan akuntansi akrual pada BPKAD kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui kendala dari penerapan akuntansi berbasis akrual pada BPKAD kabupaten Bone

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini:

- a. Bagi penulis, sebagai saran untuk memahami bagaimana penerapan akuntansi basis akrual ini pada BPKAD kabupaten Bone
- b. Bagi Akademis, Sebagai bahan acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat menambah wawasan kepada akademisi mengenai Penerapan Basis Akrual Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintahan yang menggunakan SAP berbasis akrual.

D. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis akan menyusun sistematis penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab kedua, merupakan bab tinjauan pustaka yang menguraikan tentang landasan teori, tinjauan teori, kerangka pikir dan hipotesis.

Bab ketiga, merupakan bab metode penelitian yang menguraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional, teknik analisis data, dan metode analisis data.

Bab keempat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang gambaran umum unit peneliti, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas serta fungsi.

Bab kelima, merupakan hasil dari penelitian serta pembahasan dari hasil tersebut.

Bab keenam, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi dapat dijelaskan melalui dua pendekatan yaitu dari segi proses dan dari segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.

Dilihat dari segi fungsinya, akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi di antara berbagai alternatif tindakan.

Berdasarkan kedua pengertian akuntansi sebagaimana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi akuntansi pada dasarnya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Hal lain yang juga dapat disimpulkan dari

kedua pengertian akuntansi dimaksud adalah mengenai pembedaan akuntansi. Menurut kedua pengertian akuntansi, kegiatan jasa yang

dilakukan oleh akuntansi dalam menyajikan informasi keuangan, selalu berkaitan dengan kegiatan suatu lembaga atau suatu perusahaan. Secara umum, akuntansi dibagi dalam tiga cabang, yaitu: akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi pemerintahan.

Secara umum, baik dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen maupun akuntansi pemerintahan, siklus yang terjadi pada dasarnya sama, dimulai dari suatu transaksi yang berkaitan dengan keuangan, sampai dengan laporan keuangan disusun.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Untuk menentukan kapan suatu transaksi itu harus diakui, tentunya harus menganalisis pengaruh transaksi terhadap perkiraan-perkiraan pada laporan keuangan. Basis Akuntansi terdiri dari :

a. Basis Kas

Basis kas merupakan pencatatan yang hanya dilakukan pada saat diterima kas ataupun di keluarkan kas. Dengan kata lain tidak ada pencatatan kalau tidak ada transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas. Sebagai contoh adalah Buku Kas Umum dan buku pembantu yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran karena pencatatan hanya dilakukan untuk penerimaan dan pengeluaran kas ataupun tidak ada pencatatan kalau tidak ada penambahan dan pengurangan kas di Bendahara Pemerintah.

b. Basis akrual

Basis akrual merupakan pencatatan yang dilakukan pada saat timbul hak dan kewajiban. Timbulnya hak tentunya akan mengakibatkan penerimaan, tapi

penerimaan atas hak yang dimaksud dapat terjadi pada periode sekarang ataupun periode yang akan datang. Tapi yang pasti sudah merupakan hak walaupun belum diterima. Pencatatan tetap harus dilakukan supaya hak tersebut tercantum pada laporan keuangan.

3. Basis akuntansi yang digunakan oleh pemerintah

Sesuai isi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tahun 2014 merupakan tahun terakhir pemerintah diperkenankan menggunakan basis kas menuju akrual. Tahun 2015 pemerintah pusat dan daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Laporan Keuangan yang dimaksud adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yg menyajikan perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggarannya

Manfaat

- berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan satker pemerintah pusat dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif

Struktur dan Isi

- Pendapatan
- Belanja
- Pembiayaan

2. Neraca

Neraca merupakan Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Manfaat

- Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas satker pemerintah pusat pada tanggal tertentu

Struktur dan Isi

- Aset
- Aset Lancar
- Investasi Jk Panjang
- Aset Tetap
- Aset Lainnya
- Kewajiban
- Jangka Pedek
- jangka Panjang
- Ekuitas

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyediakan informasi ttg seluruh kegiatan operasional keuangan yg mencakup pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional, yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Manfaat dan Tujuan

- Melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, LPE dan Neraca mempunyai keterkaitan yang jelas.

Isi dan Struktur

- Pendapatan-LO
- Beban
- Surplus/Defisit dari operasi
- Kegiatan non operasional

- Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- Pos Luar Biasa
- Surplus/Defisit-LO

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tujuan

- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Isi dan Struktur

- Ekuitas awal
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.
- Saldo Ditagihkan kepada Entitas Lain/ Diterima dari Entitas Lain
- Ekuitas akhir

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Tujuan & Manfaat

- Memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan
- Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah

Isi:

- Penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO, dan LPE.

Sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual pada Lampiran I PP No.71 Tahun 2010, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Informasi tentang posisi keuangan tersebut adalah menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya pada suatu entitas. Pertanyaan yang muncul adalah “Apakah laporan keuangan yang menggunakan basis akrual akan menggambarkan keadaan keuangan yang sebenar-benarnya”? Dari Penjelasan tentang basis akrual di atas bahwa basis akrual adalah pencatatan dilakukan pada saat timbul hak dan kewajiban pada suatu periode akuntansi. Seperti contoh di atas apabila tidak menggunakan akrual, maka pada laporan keuangan per 31 Desember 2012 tidak ada penambahan piutang pada neraca dan pendapatan sewa pada laporan operasional sebesar Rp. 1.000.000,- yang seharusnya dilihat dari transaksi sudah timbul hak atau piutang yang merupakan pendapatan sewa pada Desember 2012 yaitu Rp. 1.000.000,- Apabila tidak dilakukan pencatatan secara akrual maka laporan keuangan seperti neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas belum menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya.

4. Tujuan dan manfaat penerapan basis akrual.

Secara sederhana, dikatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidak cukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Dalam presentasinya, Heather Thompson, Project Manager dari *Transition from Cash to Accrual Accounting Project, Public Expenditure Management*, pemerintah *BARBADOS*, menyampaikan beberapa tujuan penggunaan basis akrual yakni sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem keuangan (penganggaran, akuntansi dan pelaporan) dalam sektor publik.
2. Untuk meningkatkan pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya sektor public.
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah.
4. Menyediakan informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan.
5. Untuk mereformasi sistem anggaran belanja (apropriasi).
6. Untuk mencapai transparansi yang lebih luas atas biaya pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan penerapan basis akrual lainnya adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah. Negara yang menerapkan basis akuntansi akrual, yang mensyaratkan pada manajernya bertanggungjawab atas hasil atau output dengan mengurangi kendali atas input, secara umum, berada di barisan depan dalam reformasi manajemen publiknya. Para manajer tersebut harus bertanggungjawab atas seluruh biaya yang berkaitan dengan hasil atau output yang diproduksi, bukan hanya nilai kas yang dibayarkan. Hanya dengan basis akrual, biaya yang sebenarnya dapat diinformasikan dan hal ini akan mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Ringkasnya, ketika para manajer diberikan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan (input), mereka berkepentingan untuk menyediakan informasi yang akurat seperti itu. Penerapan basis akrual sejalan dengan tujuan reformasi manajemen keuangan di suatu negara dalam arti yang luas. Penggunaan basis akrual untuk pelaporan keuangan akan berhasil diterapkan pada negara yang secara signifikan mengurangi kendali atas input.

Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya. Manfaat-manfaat penerapan basis akrual, menurut *H Thompson*, akan mencakup hal-hal dibawah ini:

1. Menyediakan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Menunjukkan bagaimana aktivitas pemerintah dibiayai dan bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna tentang tingkat yang sebenarnya kewajiban pemerintah
4. Meningkatkan daya pengelolaan asset dan kewajiban pemerintah.
5. Basis akrual sangat familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya.
6. Prinsip dan standar yang dapat diterima umum membentuk basis transaksi pelaporan.
7. Menyediakan data yang lebih meningkat ketika pemerintah melakukan kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan ekonomi.
8. Secara signifikan memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran, khususnya melalui pengakuan dan pengendalian asset dan kewajiban pemerintah.
9. Statistik Keuangan Pemerintah (*GFS*) yang dipraktekkan secara internasional berbasis akrual.

5. Kelebihan dan kekurangan penerapan basis akrual

Menurut *International Federation of Accountants (IFAC)* dalam *Public Committee Study Nomor 14 tentang Transition to The Accrual Basis of Accounting: Guidance for Governments and Government Entities (second edition)* terdapat

beberapa kelebihan sekaligus kekurangan dalam penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan. Kelebihannya antara lain:

1. Memberikan gambaran bagaimana pemerintahan membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan pendanaannya;
2. Memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan untuk memenuhi segala kewajiban dan komitmen-komitmen yang ada;
3. Menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangannya;
4. Menyediakan ruang bagi pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya
5. Memberikan manfaat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas serta pencapaian hasil akhir atas penggunaan sumberdaya yang dikelolanya

Adapun kekurangan dalam penerapan basis akrual, antara lain:

1. Biaya yang cukup besar yang harus disiapkan untuk menangani hal-halsebagai berikut :
 - a. Biaya untuk penilaian aset;
 - b. Biaya untuk penyiapan kebijakan akuntansi;
 - c. Biaya untuk membangun sistem akuntansi termasuk membeli computer atau peralatan lainnya untuk mendukung sistem tersebut;
 - d. Biaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni untuk menangani akuntansi pemerintahan berbasis akrual
2. Basis akrual pada dasarnya didesain untuk mengukur laba sehingga kurang memberikan arti pada sektor publik atau pemerintahan;

3. Basis akrual lebih kompleks dibandingkan dengan basis kas sehingga ada kemungkinan parlemen (DPR/DPRD) kurang memberikan perhatian dalam penelaahan sehingga mengurangi akuntabilitas laporan keuangan tersebut;
4. Memerlukan ruang yang lebih luas dalam hal pertimbangan profesional (*profetional judgement*) baik oleh penyedia laporan keuangan (entitas pelaporan/entitas akuntansi) maupun auditor pemerintah.

6. Tantangan dalam penerapan basis akrual

Masih adanya kekurangan dalam penerapan basis akrual ini mengakibatkan adanya tantangan yang akan muncul ketika penerapan basis akrual secara penuh diterapkan. Diantara tantangan yang akan muncul akibat diimplementasikannya SAP berbasis akrual adalah:

1. Perbaikan yang harus dilakukan pada sistem akuntansi dan teknologi akuntansi yang memadai UU Nomor 1 tahun 2004 yang menyatakan, "*Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*" Ini dikarenakan SPI yang ada harus memberikan gambaran memadai atas ketercapaian tujuan melalui kegiatan yang efektif dan efisien;
2. Harus tersedianya tenaga akuntan yang kompeten Pelaporan keuangan yang menuntut ketepatan waktu memerlukan tenaga yang mampu bekerja secara kompeten dan memiliki integritas yang baik. Hal ini yang menyebabkan perlunya SDM yang baik dan terlebih menguasai akuntansi pemerintahan.

Selain dari dua tantangan di atas, Simanjuntak (2010) menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan basis akrual secara penuh, yakni:

1. Komitmen Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada beberapa Kementerian/Lembaga adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sebagai penerima dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

2. Resistensi terhadap perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, bisa jadi ada pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan enggan untuk mengikuti perubahan. Untuk itu, perlu disusun berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

7. Strategi penerapan basis akrual di Indonesia

Melihat dari adanya kelebihan dan kekurangan serta peluang dan tantangan dari basis akrual, maka ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk menggapai keberhasilan (*key succes factor*) dalam hal penerapan basis akrual. Bahkan dari tantangan ini juga harus dilakukan persiapan strategi yang perlu diterapkan. Athukorala (2003) dalam Widjajarsa (2009) menyatakan bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan basis akrual antara lain:

1. Kehati-hatian dalam memilih strategi penerapan akrual

Secara umum terdapat dua model utama dalam penerapan basis akrual pada sistem akuntansi pemerintahan, yaitu *big bang* dan model bertahap. Selandia Baru yang

merupakan pelopor pendekatan *big bang* mampu membuktikan bahwa basis akrual dapat dilaksanakan dengan waktu yang singkat untuk seluruh unit pemerintahan. Kesuksesan penerapan di Selandia Baru karena tiga faktor yang mendukung, yakni adanya krisis fiskal, dukungan dari para politisi, dan adanya reformasi birokrasi yang memberikan fleksibilitas kepada SDM. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menerapkan model pendekatan bertahap. Keuntungan dari pendekatan ini adalah dapat diketahuinya permasalahan yang mungkin timbul dan cara penyelesaiannya selama masa transisi, basis kas masih dapat dilakukan secara paralel untuk mengurangi resiko kegagalan;

2. Komitmen politik merupakan salah satu kunci penting

Komitmen politik dalam penerapan basis akrual bagi negara berkembang menjadi sangat esensial, sehingga komitmen politik ini diperlukan untuk menghilangkan adanya kepentingan yang tidak sejalan;

3. Tujuan yang ingin dicapai harus dikomunikasikan

Hasil dan manfaat yang ingin dicapai melalui penerapan basis akrual harus secara intens dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan;

4. Perlunya tenaga akuntan yang andal

Tenaga akuntan yang profesional akan sangat diperlukan untuk rekrutmen dan pelatihan yang cukup. Kekurangan tenaga akuntan akan menyebabkan penundaan penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintahan;

5. Sistem informasi akuntansi harus memadai

Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual;

6. Badan audit tertinggi harus memiliki sumber daya yang tepat

Badan Audit memegang kunci yang sangat penting dalam penerapan basis akrual. Diperlukan waktu beberapa tahun untuk melakukan profesionalisme tenaga audit seperti yang dilakukan oleh Selendia Baru;

7. Penerapan basis akrual harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

Penerapan basis akrual tidak hanya dilihat sebagai masalah tehnik akuntansi saja, tetapi penerapan ini membutuhkan perubahan budaya organisasi dan harus merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara menyeluruh. Informasi yang dihasilkan dengan basis akrual akan menjadi berharga dan sukses apabila informasi yang dihasilkan digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan publik yang lebih baik. Perubahan ini tidak otomatis terjadi, tapi perlu secara aktif dipromosikan secara berkelanjutan.

Menurut Simanjuntak (2010) menyatakan bahwa perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 tahun 2003. Oleh karena itu, perubahan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari basis kas menuju basis akrual dilakukan secara bertahap. Sesuai dengan pilihan dari KSAP yang menerapkan strategi dalam penyusunan basis akrual yakni penyusunan secara bertahap mulai dengan awal diterbitkannya PP Nomor 24 tahun 2005 yang di dalamnya mengatur tentang penggunaan basis kas menuju akrual. Kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 tahun 2010 yang secara tegas mengharuskan penggunaan basis akrual dengan bertahap hingga tahun 2014. Pemilihan strategi penerapan basis akrual secara bertahap ini atas beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. SAP berbasis kas menuju akrual telah disusun dengan mengacu pada beberapa referensi bertaraf internasional antara lain IPSAS, *Governmental Accounting*

Standards Board (GASB), dan *Government Finance Statistics(GFS)*, sehingga diharapkan SAP berbasis kas menuju akrual yang akan disesuaikan menjadi akrual sudah dapat diterima umum;

- b. Mengurangi resistensi dari para pengguna SAP (PP Nomor 24 Tahun 2005) terhadap perubahan basis akuntansi. Pengguna PP Nomor 24 Tahun 2005 masih dalam tahap pembelajaran dan perlu waktu yang cukup lama untuk memahaminya sehingga apabila SAP akrual berbeda jauh dengan SAP berbasis kas menuju akrual akan menimbulkan resistensi;
- c. Penyusunan SAP berbasis akrual relatif menjadi lebih mudah karena sebagian dari PSAP berbasis kas menuju akrual (PSAP Nomor 01, 05, 06, 07, dan 08 dalam PP 24/2005) telah berbasis akrual sehingga hanya memerlukan penyesuaian beberapa PSAP berbasis akrual;
- d. Penerapan SAP berbasis akrual yang disusun sesuai pola SAP berbasis kas menuju akrual lebih mudah bagi para pengguna standar karena sudah disosialisasikan, dan para pengguna telah memiliki pemahaman dan pengalaman terhadap SAP berbasis kas menuju akrual

B. Landasan Penelitian Terdahulu

Penelitian Arliana, (2011) bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar serta mengetahui faktor-faktor dan nilai-nilai pendukung yang dimiliki oleh KPKNL Makassar sehingga mampu menerapkan basis akrual lebih awal. Responden dalam penelitian sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari pegawai KPKNL Makassar. Data dikumpulkan melalui proses wawancara langsung dengan para responden menggunakan panduan wawancara,

observasi langsung terhadap aktivitas-aktivitas para pegawai KPKNL Makassar serta studi dokumentasi atas dokumen-dokumen terkait.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum pegawai KPKNL Makassar sudah memahami makna akuntansi berbasis akrual, gambaran umum pelaksanaan akuntansi pada KPKNL Makassar yang sangat terbantu dengan adanya sistem aplikasi akuntansi berbasis akrual, faktor-faktor yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan akuntansi berbasis akrual yaitu: komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia dan teknologi), sikap/disposisi dan struktur birokrasi, adapun nilai-nilai yang dimiliki untuk menunjang implementasi basis akrual yang lebih awal yaitu: integritas, profesionalisme (akuntabilitas dan komitmen), sinergi, pelayanan (ketulusan dan transparansi), serta kesempurnaan.

Penelitian Faradillah, (2013) ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai dari bagian keuangan SKPKD dan SKPD Kota Makassar. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan pendekatan interpretif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual merupakan refleksi dari suatu formalitas. Hal tersebut didukung dengan adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan untuk semua pemerintah daerah termasuk pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan SAP berbasis akrual. Kompleksitas laporan keuangan menjadi faktor utama dalam sikap resisten pengelola keuangan pemerintah Kota Makassar dalam implementasi SAP berbasis akrual. Sedangkan, dari sisi budaya organisasi, pemerintah Kota Makassar diwajibkan menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

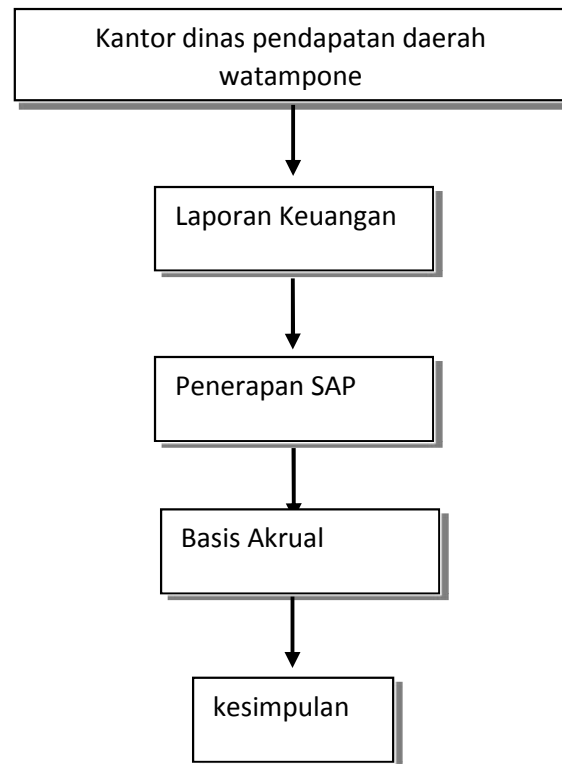
Penelitian Kusuma, (2013) bertujuan untuk mengetahui kesiapan pemda kabupaten Jember dalam menerapkan SAP berbasis akrual yang diindikasikan dengan komitmen, SDM, sarana prasarana dan sistem informasi serta untuk mengetahui kendala dalam implementasi PP No 71 Tahun 2010 dan bagaimana model strategis akselerasi implementasi PP No 71 Tahun 2010. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jember. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai SKPD di Kabupaten Jember dan sampelnya adalah pegawai bagian akuntansi pada SKPD di Kabupaten Jember. Metode analisis data yang digunakan meliputi uji instrumen data (uji validitas dan uji reliabilitas) dan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember cukup siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Masih ada beberapa kendala terkait dengan implementasi PP No 71 Tahun 2010 seperti : penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (excel) belum ada perangkat lunak khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitas dan kualitas masih belum cukup, kurangnya Bintel atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi. Sehingga model strategis akselerasi implementasi PP No 71 Tahun 2010 antara lain : dengan mengembangkan SAP berbasis akrual sesuai dengan kebutuhan, menyusun buletin teknis SAP berbasis akrual, mengembangkan SDM di bidang akuntansi pemerintahan.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan diatas dari teori yang telah dibahas, maka dapat disusun kerangka pikir yang menggambarkan tentang penggunaan basic akrual dalam laporan keuangan.

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1.1 menjelaskan tahapan akuntansi berbasis akrual pada pencatatan transaksi keuangan pada lembaga di kantor pemerintahan daerah. Basis akrual dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kota daerah bone melakukan pelaporan keuangan, Pelaporan keuangan pada lembaga pemerintahan dengan menerapkan SAP yakni Basis akrual. Selanjutnya setelah penerapan basis akrual dilakukan maka mendapat kesimpulan berupa informasi mengenai pencatatan transaksi pengeluaran dan penerimaan kas, juga mencatat jumlah hutang dan piutang dengan diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan.

D. Hipotesis

Diduga pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Bone menerapkan SAP basis akrual dimana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Yang akan dilaksanakan pada Februari 2017 s/d April 2017.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode kepustakaan (*library research*)

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku referensi atau catatan-catatan serta bahan dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

- a. Pengamatan (*Observasi*) yaitu pengamatan secara langsung pada objek penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu merupakan pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keteerangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatapmuka antara pewawancara dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

C. Jenis dan Sumber Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang di pergunkan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan.
 - b. Data kuantitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka atau bilangan, baik yang diperoleh dari hasil pengukuran maupun dengan jalan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif.
2. Sumber data
 - a. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Teknik yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu observasi, wawancara, dan dikusi terfokus
 - b. Data sekunder, merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah di susun dalam arsip (data documenter) yang di publikasikan dan yang tidak di publikasikan.

D. Teknik analisis data

Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengumpulan kategori, peneliti mencari suatu kumpulan data dan mengategorikannya sesuai dengan karakteristik data tersebut. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan mencari data-data mengenai proses laporan keuangan daerah yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan data-data yang diperoleh dari wawancara langsung terhadap aktor-aktor yang menjalankan standar.

2. Interpretasi langsung, peneliti akan menarik langsung makna dari sebuah data yang telah diperoleh. Jadi, setelah memperoleh data laporan keuangan daerah Pemerintah kabupaten Bone serta data-data sosial yang berkaitan dengan teori institusional, maka peneliti akan menginterpretasikan secara langsung bagaimanakah implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
3. Pengambilan keputusan, peneliti akan menarik kesimpulan secara umum (*general*) mengenai kondisi nyata (*natural*) yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bone tentang bagaimana implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Setelah data dari lapangan terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan pendekatan interpretif. Pendekatan interpretif merupakan suatu teknik menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

E. Definisi Operasional

Pada tahun 2010, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accrual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah kabupaten Bone.

Perubahan basis akuntansi ini tidak serta merta muncul karena sebenarnya sudah disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Setelah itu Pemerintah menyusun langkah-langkah yang dianggap perlu guna implementasi penuh akuntansi akrual di Indonesia pada tahun 2015. Khusus untuk Pemerintah Daerah, pada tahun 2013 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan akuntansi berbasis akrual secara penuh paling lambat tahun 2015.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Neraca;
- f) Laporan Arus Kas;
- g) Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bone

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Berdasarkan data Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2015 adalah 738.515 jiwa, terdiri atas 352.081 laki laki dan 386.434 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, rata rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km². Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 328 desa dan 44 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°13'- 5°6' LS dan antara 119°42'-120°30' BT. Luas wilayah Kabupaten Bone 4.559 km². Keberadaan penduduk dalam jumlah yang besar, seringkali dianggap sebagai pemicu masalah-masalah kependudukan seperti kemiskinan dan pengangguran. Namun, dalam tinjauan demografi, penting untuk melihat struktur umur penduduk. Penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan positif dalam pembangunan ekonomi.

B. Visi, Misi, dan Tujuan BPKAD Kabupaten Bone

Visi BPKAD :

Menjadikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sebagai Lembaga yang Amanah dalam Pelayanan Publik

Misi BPKAD :

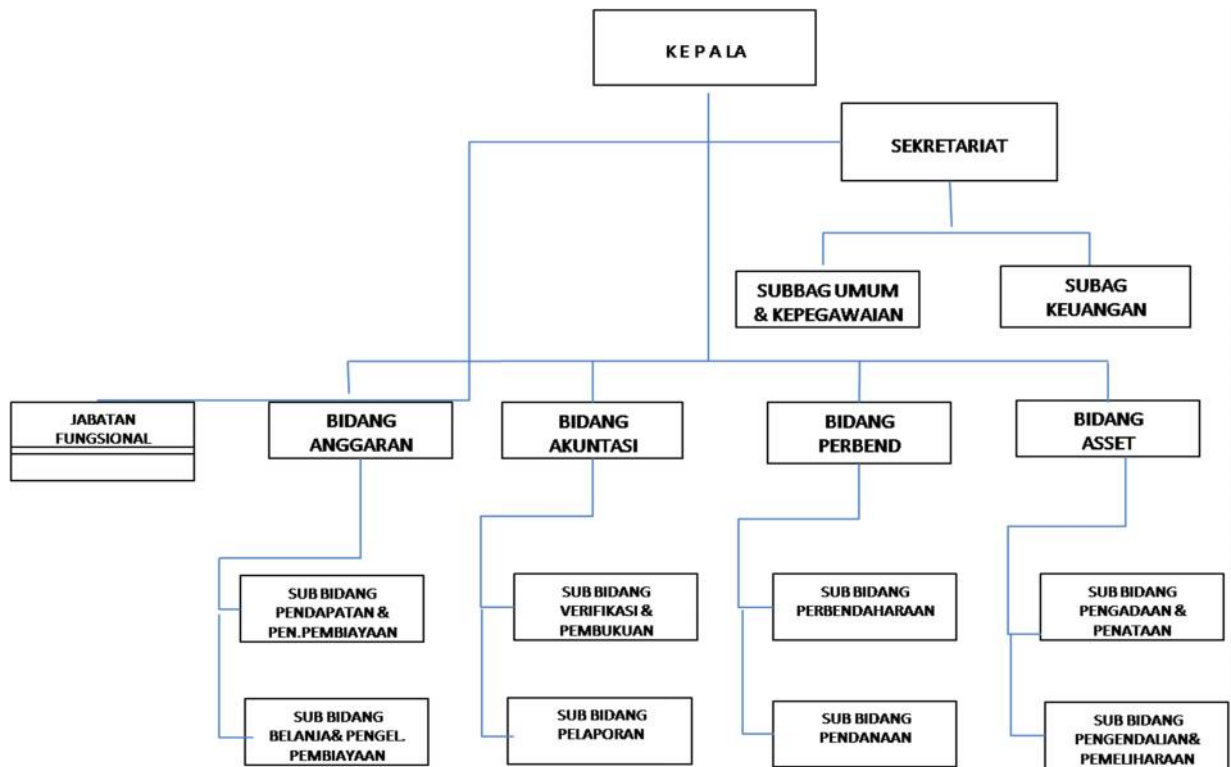
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur lembaga di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas keuangan daerah
3. Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan aset daerah dalam rangka terciptanya akuntabilitas aset daerah

C. Struktur Organisasi

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
3. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan

3. Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Administrasi Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji; dan
 3. Sub Bidang Verifikasi.
 5. Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Pertanggungjawaban belanja dan pengeluaran pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Penyusunan Laporan Keuangan.
 6. Bidang Aset, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Penata Usahaan;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan, pengamanan/pemeliharaan dan Pemindah Tangan Barang Milik Daerah ;dan
 3. Sub Bidang Penggunaan, Penilaian, Penghapusan dan Pemusnahan.
 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan.
 8. Kelompok Jabatan pelaksana dan jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini



Gambar 1.2 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bone

D. Tugas dan Fungsi

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 1. perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
 2. pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

- **Latar Belakang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI di Pemerintah Kabupaten Bone**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan salah satu ujung tombak dari sebuah pengelolaan keuangan daerah yang baik, akuntabel, dan transparan. Memiliki standar akuntansi pemerintahan yang baku telah menjadi harapan bangsa Indonesia sejak masa reformasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bastari (2004) bahwa implementasi UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan PP No. 105 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pengelola dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tidak dapat terlaksana dengan baik karena pada saat itu belum memiliki pedoman yang jelas secara teknis mengenai pembuatan laporan keuangan.

Setelah itu, pemerintah melakukan kajian dan langsung mengeluarkan paket undang-undang di bidang reformasi keuangan khususnya akuntansi pemerintahan yakni dimulai dari UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Cash Towards Accrual*), PP No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (*Accrual*), dan puncaknya berada pada Permendagri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah.

Dengan turunnya Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 10 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015" inilah yang membuat seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bone mau tidak mau harus mempersiapkan diri untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

Data yang dikumpulkan peneliti melalui wawancara dengan seorang informan, menunjukkan bahwa aparatur pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Bone ketika ditanyakan mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, mereka sudah tahu akan definisi dari basis akrual itu sendiri, seperti yang di katakan oleh Kabid Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone bahwa akuntansi basis akrual itu merupakan suatu basis dimana transaksi ekonomi dan transaksi lainnya dicatat, diakui dan disajikan dalam laporan keuangan tanpa melihat kas atau setara kas telah diterima atau dibayarkan.

Dari pandangan informan di atas terhadap pengertian basis akrual, dapat dikatakan bahwa aparat pengelola keuangan di pemerintah Kabupaten Bone telah mengetahui akuntansi pemerintahan basis akrual itu seperti apa. Hal ini diperkuat juga dengan pemaparan yang diuraikan oleh Ibu Husnani selaku Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Bone. Beliau mengatakan bahwa akuntansi berbasis akrual itu kita langsung mengakui pendapatan pada saat transaksi terjadi. Dan memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan instansi/pemerintah daripada akuntansi basis kas. Saat ditanyakan lebih lanjut mengenai strategi pemerintah

dalam menerapkan akuntansi Basis AkruaI sudah berjalan dengan baik dilingkungan BPKAD Kabupaten Bone, beliau menjawab “pemerintah daerah telah bersinergi dengan pemerintah pusat terkait penerapan basis akruaI dengan melakukan berbagai persiapan awal antara lain :

1. penyediaan sarana dan prasarana ;
2. peningkatan kapasitas SDM;
3. penyesuaian regulasi tentang basis akruaI.

Awal mula proses institusionalisasi dalam implementasi SAP basis akruaI di Pemerintah Kabupaten Bone terjadi ketika Kementerian Dalam Negeri mulai mengeluarkan aturan untuk menerapkan SAP basis akruaI paling lambat tahun 2015. Dari pernyataan tersebut telah terlihat tentang bagaimana awal mula implementasi SAP basis akruaI ini dapat benar-benar terlaksana di tingkat pemerintah daerah. Setelah berbagai macam pengenalan mengenai SAP berbasis akruaI yang dijelaskan melalui sosialisasi, bimtek, dan banyak pelatihan lainnya, Pemerintah Kabupaten Bone mulai melakukan strateginya tentang bagaimana SAP basis akruaI ini dapat terlaksana pada tahun 2015.

B. Pembahasan

1. Makna Basis AkruaI Pemerintah Kabupaten Bone: Kompleksitas Laporan Keuangan

Rata-rata aparatur pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Bone ketika ditanyakan tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akruaI, mereka sudah matang akan definisi dari basis akruaI itu sendiri. Ibu Husnani mengatakan bahwa: Basis akruaI adalah metode akuntansi dimana penerimaan

dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan dan memberikan gambaran yang lebih akurat atas kondisi keuangan instansi/pemerintah daripada akuntansi berbasis kas.

Mulai tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 mewajibkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun laporan keuangan berbasis akrual dan terdapat penambahan komponen laporan keuangan berbasis akrual yang wajib disusun oleh SKPD yaitu laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca. Ketiga laporan keuangan tersebut saling terkait. LO dengan LPE memiliki keterkaitan melalui surplus atau defisit LO. Surplus dan defisit dihasilkan dari selisih antara pendapatan-LO dengan beban. Secara bersamaan surplus atau defisit akan berpengaruh terhadap saldo ekuitas akhir dalam LPE. Saldo ekuitas akhir tersebut seharusnya sama dengan saldo ekuitas di neraca.

Dapat dikatakan bahwa pengelola laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bone telah menyadari adanya pergantian standar akuntansi pemerintahan yang saat ini berlaku yaitu peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Walaupun secara nyata, jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan.

Namun, bagi para pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Bone, kompleksitas pelaporan keuangan yang dihasilkan oleh PP 71/2010 semakin nampak dengan tidak adanya keterkaitan antara pelaporan pelaksanaan anggaran (akuntansi anggaran) dengan pelaporan finansial (akuntansi keuangan). Pemisahan antara akuntansi keuangan dengan akuntansi anggaran ini disebut dengan *extra countable* atau pencatatan terpisah antara akuntansi dengan anggaran. Dengan demikian, hal ini pastinya memerlukan analisa yang berbeda.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan sebuah implikasi bahwa kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bone saat ini dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan hal baru yang mana hampir setiap SKPD menjalankan ini karena bentuk ketaatan dan tanggung jawab mereka sebagai organisasi pemerintahan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sebuah implikasi bahwa kondisi yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bone saat ini dalam mengimplementasikan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual merupakan hal baru yang mana hampir setiap SKPD menjalankan ini karena bentuk ketaatan dan tanggung jawab mereka sebagai organisasi pemerintahan.

Ketika ditanyakan apakah peraturan ini harus dilaksanakan, pejabat terkait mengungkapkan: Ya, dengan alasan karena peraturan ini sudah menjadi keputusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan sudah menjadi pembahasan baik oleh BPK, Menkeu, Menhukham, yang tujuannya untuk menyajikan informasi keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan

dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dikelola. Selanjutnya mengatakan: Harus, selain hal ini sudah menjadi ketetapan pemerintah untuk dilaksanakan, juga memudahkan Pemda untuk mengetahui seberapa besar sumber daya ekonomi dan beban yang harus ditanggung dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Secara pribadi, karena kebetulan kerja dalam instansi pemerintahan, maka pastinya kita ikuti perubahan yang telah ditetapkan pemerintah. Tidak apa-apa juga selama perubahan itu untuk kebaikan dan selama perubahan itu bagus.

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menandakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Mencermati seputar penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang diharuskan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pejabat terkait mengatakan: PP 71 bagi daerah ini mungkin merupakan produk baru, tapi kalau kami lihat, Kabupaten Bone pasti bisa menerapkan peraturan ini mengingat standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini merupakan produk baru, namun sangatlah jelas bahwa baik para pengelola keuangan lain di pemerintahan Kabupaten Bone sangat optimis dengan keberhasilan dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini.

2. Analisis Kendala dalam Implementasi Basis Akrual Pada Laporan Keuangan BPKAD Kabupaten Bone

Dalam penyajian laporan keuangan BPKAD Kabupaten Bone yang mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual terdapat kendala-

kendala. Salah satu kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan bagaimana teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih sulit dibandingkan berbasis kas hal itu disebabkan oleh adanya pos-pos piutang, hutang dan penyusutan yang muncul. Kurangnya sumber daya manusia dapat dibuktikan dengan keterlambatannya pelaporan keuangan Tahun Anggaran 2015, pemerintah Kabupaten Bone dalam menyampaikan laporan keuangan (BPK-RI) pada tanggal 22 April 2016 berdasarkan nomor surat 900/654/IV/DPKAD/2016 tanggal 16 April 2016 perihal jadwal penyerahan LKPD TA. 2015. Atau mengalami keterlambatan dari ketentuan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini diakibatkan penerapan basis akrual untuk pertama kalinya. *Struktur organisasi*. Sesuai PP No.41/2007, Pemda sudah harus menyusun struktur organisasi (SOTK) baru dimana ruang untuk akuntansi semakin terbuka. Namun, rendahnya kualitas dan kuantitas SDM akuntansi menjadi persoalan yang kian berat.

Belum lagi ketiadaan sanksi. Apa sanksi kepada Pemda jika tidak melaksanakan SAP? Sampai saat ini belum ada. BPK selaku auditor justru tak jarang diminta oleh Pemda menjadi konsultan atau membantu menyusun LKPD. Sesuatu yang tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Bagaimana kalau opini BPK atas LKPD berupa “tidak wajar” atau “*disclaimer*“?

Mereka menambahkan hal yang masih perlu dilakukan oleh pemerintah terkait adanya peraturan ini antara lain:

1. Masih perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis;
2. Mengikutsertakan pegawai-pegawai dalam sosialisasi dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh departemen keuangan;
3. Mengharuskan pegawai membaca dan memahami peraturan ini;
4. Melaksanakan Kursus dan pelatihan terkait hal ini.

Selama ini, Pemerintah Kabupaten Bone dalam persiapan menuju standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual telah melakukan langkah-langkah strategis berupa pemberian sosialisasi atau pelatihan kepada para pegawai, menyiapkan software yang menunjang implementasi serta membuat peraturan daerah. Sosialisasi atau pelatihan diberikan dengan maksud untuk memberi pemahaman yang lebih luas kepada pihak-pihak pengelola keuangan pemerintahan Kabupaten Bone dalam hal ini SKPD-SKPD Kabupaten Bone tentang basis akrual.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A, Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada penerapan basis akrual dalam pelaporan keuangan daerah oleh BPKAD Kabupaten Bone menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual signifikansi peran pemerintahan dalam sektor publik untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, semakin nyata. Peraturan pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak terkecuali pemerintah Kabupaten Bone mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan salah satu kendala penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui atau menguasai secara penuh atau secara keseluruhan bagaimana teknik penyusunan laporan keuangan berbasis akrual karena penyusunan laporan keuangan berbasis akrual lebih sulit dibandingkan berbasis kas hal itu disebabkan oleh adanya pos-pos piutang, hutang dan penyusutan yang muncul.

Sehingga menyebabkan keterlambatan pelaporan keuangan TA 2015. Meskipun secara nyata, jenis laporan keuangan yang secara kuantitas seperti terlihat banyak tersebut, kalau diteliti lebih lanjut sebenarnya hanya

pengembangan dari yang sudah ada dan nantinya justru akan menunjukkan artikulasi yang semakin jelas antar laporan keuangan. Namun, bagi para pengelola keuangan pemerintah Kabupaten Bone.

B. Saran

Dengan kondisi yang demikian, peneliti ingin memberikan saran bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini bisa dilaksanakan dengan baik, yakni sebagai berikut

1. Melakukan edukasi kepada para SKPD mengenai pemaknaan secara mendalam tentang akuntansi berbasis akrual. Karena hal ini penting agar para SKPD memiliki *mindset* yang cukup kuat tentang basis akrual dan apa kelebihannya. Sehingga, SKPD tidak bersifat gugur kewajiban setelah mampu melaksanakan basis akrual ini.
2. Pemerintah harus memperhatikan lagi mengenai kondisi SDM, karena sebenarnya perlu untuk mendapatkan SDM yang lebih kompeten dengan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi
3. Perlu melakukan koordinasi antara SKPD-SKPD (BKD, Inspektorat) terkait dalam proses penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini, agar memiliki masukan-masukan dari berbagai pihak. Sehingga dapat dilakukan kajian-kajian secara mendalam tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Puji, dan Riyanto. 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Bandung: Pustaka Pelajar
- Arikunto. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sagung Seto.
- Bahar, Ewid, dan Rafika. 2015. *Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua*. Universitas Diponegoro, Semarang. dan R&D. Bandung:Alfabeta
- Dora, sopia. 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. Universitas HKBP, Medan.
- Faradillah, Andi. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah*. Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar.
- Kusuma. 2013. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*. Kabupaten Jember.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 36 Ayat (1)*. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2010*. Jakarta.
- Simanjuntak, Binsar H. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Sektor Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta
- Sugiyono.2013.*Metode Penelitian Pendidikan.Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,*

LAMPIRAN-LAMPIRAN